



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUKRI  
NIK : 6472050203630005  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI SAMARINDA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
Jabatan : PANITERA PENGGANTI  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 5 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUKRI  
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI  
3. NHK : 522210

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/90 m2 di KOTA SAMARINDA .  
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 157.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINI BUS Tahun 2014. HASIL  
SENDIRI Rp. 150.000.000

2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX BEBEK Tahun 2008. HASIL  
SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 24.628.858

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

Sub Total

Rp. 531.628.858

**III. HUTANG**

Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 531.628.858

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.